

Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Strukturasi: Analisis Penyelenggaraan Organisasi PKK pada Pembangunan Desa

Retno Susilowati¹⁾, Khairunnas²⁾, Rahmat Rafinzar³⁾, Indra Tamsyah⁴⁾

^{1),4)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya, Indonesia

^{2),3)}Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email Corresponding Author: rahmatrafinzar@fisip.unsri.ac.id

ABSTRACT

The involvement of women in a number of village development programs is still very low when compared to the quantity of men's involvement in government and village development programs as the background for this research. The research was conducted in Pulau Semambu Village, Ogan Ilir. The formulation of the research problem is how the role of the PKK organization in village development is viewed from a structuring perspective. The aim of this research is to look at the role of the PKK organization in village development. The method used is Qualitative Descriptive with data analysis techniques using the Miles and Huberman interactive model and data validation using triangulation. Anthony Giddens' structural theory used will be the analytical tool used by researchers in studying phenomena found in the field. This theory is used as guidance in the research to be carried out. This research links the implementation of PKK in village development using a structuring perspective. Not only structures, but agents also have a very big role in the PKK organization's role in encouraging women's involvement in a number of village development programs. The parties involved in this matter are agents. The results of the research show that the role of the PKK organization in Pulau Semambu Village has had a positive impact on development programs, but not all of the main PKK programs are running well. There are still obstacles in the management of the PKK organization, especially human resources, infrastructure and budget issues, so that most of the program budget uses voluntary donations from members and private donations from village government elements. The government needs to provide support to PKK managers at every level, both materially and immaterially.

Keywords : Gender Mainstreaming; Structuration; PKK Organizations; Village Development

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam sejumlah program pembangunan desa yang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kuantitas keterlibatan laki-laki dalam pemerintahan dan program-program pembangunan desa melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian dilakukan di Desa Pulau Semambu, Ogan Ilir. Rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana peran organisasi PKK dalam pembangunan desa ditinjau dari perspektif strukturasi Tujuan penelitian ini untuk melihat peranan organisasi PKK dalam pembangunan desa. Metode yang digunakan Kualitatif Deskriptif dengan Teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman dan validasi data dengan triangulasi. Teori sturkturasi Anthony Giddens yang digunakan ini akan menjadi pisau analisis yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji fenomena yang ditemukan di lapangan. teori ini digunakan sebagai guidance dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini mengaitkan penyelenggaraan PKK dalam pembangunan desa menggunakan perspektif strukturasi. Tidak hanya struktur, tetapi agen juga memiliki peran yang sangat besar dalam peran organisasi PKK mendorong keterlibatan perempuan dalam sejumlah program pembangunan desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal tersebut adalah agen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran organisasi PKK Desa Pulau Semambu sudah memberikan dampak positif dalam program pembangunan, namun belum seluruh program pokok PKK berjalan dengan baik. Masih terdapat kendala dalam pengelolaan organisasi PKK khususnya masalah sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran sehingga sebagian besar anggaran program menggunakan sumbangan sukarela oleh para anggota dan donasi pribadi dari unsur pemerintahan desa Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada pengelola PKK ditiap tingkatan baik secara materil maupun immaterial.

Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender; Strukturasi; Organisasi PKK; Pembangunan Desa

1. Pendahuluan

Kesenjangan gender ini sering terlihat dalam pembangunan politik, karena politik adalah salah satu bidang yang sulit dicapai, terutama bagi perempuan. Hal ini bisa diamati melalui dua indikator yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui sejauhmana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender telah berhasil diterapkan. Pertama, indeks pembangunan gender, yang membandingkan capaian indeks pembangunan manusia untuk laki-laki dan perempuan. Kesenjangan antarjenis kelamin lazim di Indonesia di banyak bidang, termasuk keluarga, penduduk, ekonomi, pasar kerja, dan pemerintah. Kesetaraan gender saat ini menjadi pertarungan tanpa akhir yang diperjuangkan baik ditingkat eksekutif maupun legislatif (Gusmansyah, 2019).

Grafik. 1 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan



Gender 2017-2021

(Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2017-2021)

Berdasarkan Grafik. 1 di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan tren positif, dalam konteks ini indeks pembangunan dan pemberdayaan gender dari tahun 2017 hingga 2021 semakin mengalami peningkatan. Menurut ketua MPR Bambang Soesatyo, angka tersebut dapat dikategorikan ke dalam level tinggi. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender ini tentu saja menandakan peningkatan pada semua aspek-aspek yang ada seperti perempuan di parlemen perempuan dalam profesi dan persentase pendapatan perempuan yang turut meningkat setiap tahun 2017-2021 (MPR, 2022). (M.P.R., n.d.)

Tujuan pembangunan Desa yang terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memiliki kaitan erat dengan Organisasi PKK, khususnya dalam konteks pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada kekeluargaan memiliki peran penting dalam mendukung implementasi SDGs di tingkat desa. Melalui program-programnya, PKK dapat mendukung berbagai aspek pembangunan desa yang sesuai dengan tujuan SDGs. Hal ini seperti dinyatakan oleh Mary Wollestonecraft dalam (Widodo et al., 2023) bahwa perempuan memiliki kedudukan intelektual dan moral yang sama dengan laki – laku dan hak yang sama namun terdapat ketidakadilan struktural yang diciptakan bagi

perempuan diantaranya kebijakan dan rencana pembangunan. Kepentingan perempuan tersaring dengan kehadiran perempuan di posisi kepemimpinan. Fakta bahwa perempuan sendiri lebih mampu mewakili kepentingan perempuan saat ini karena mereka benar-benar lebih memahami kebutuhan mereka sendiri. Isu gender dulu sering menjadi perhatian perempuan, tetapi sekarang isu tersebut bertransisi menjadi salah satu isu politik. Di mana topik kesetaraan gender sudah sering muncul dalam sejumlah isu politik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpartisipasi dalam *G20 Ministerial Conference on Women's Empowerment (MCWE)* yang membahas tujuh rekomendasi, salah satunya adalah “meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan mengurangi ketegangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki.” Diskusi ini adalah contoh dari apa yang baru-baru ini terjadi. Deklarasi Pemimpin G20 poin 46 menyatakan bahwa “Pemerintah negara anggota G20 berkomitmen untuk mengimplementasikan *G20 Roadmap Towards and Beyond the Brisbane Goal* untuk mendorong inklusi keuangan dan akses ke teknologi digital, serta mengatasi ketimpangan distribusi pekerjaan industri dalam negeri. dan pemeliharannya (Kemenkominfo, 2022)

Namun, seluruh Undang-Undang Pembangunan Nasional, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan untuk keberhasilan pembangunan desa, sudah memperhitungkan peran perempuan jauh sebelum para pemimpin KTT G20 2022. Tetapi kenyataannya jauh berbeda, kontribusi perempuan terhadap pembangunan desa masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Grafik. 2 Keterlibatan Perempuan Desa



(Sumber: Wardah, 2022)

Berdasarkan Grafik. 2 di atas menunjukkan bahwa keterlibatan Perempuan di Pembangunan Desa dalam konteks ini partisipasi sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Ketua/ Anggota BPD masih di bawah angka partisipasi Laki-Laki. Menurut Abdul Halim Iskandar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengklaim bahwa perempuan desa kini lebih aktif terlibat. Saat ini terdapat 4.120 perempuan dari 74.961 kepala desa di Indonesia atau 5,5% dari total. Sebanyak 149.891 perangkat desa perempuan, atau 22,1%

dari total 677.335 perangkat desa di Indonesia, juga turut serta dalam urusan desa. Sebagai ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebanyak 83.698 perempuan desa turut serta. 17,7% dari 472.825 anggota BPD di Nusantara diwakili oleh angka ini (Wardah, 2022). Akan tetapi, menurut Budhis Utami, Deputi Bidang Program Lembaga Kapal Perempuan, peran perempuan di pedesaan-khususnya yang terletak di daerah pegunungan, pulau, pedesaan, dan lingkungan yang rusak masih terbelakang. Hal tersebut menurut Budhis dikarenakan oleh masih sulitnya mengakses layanan kesehatan, sarana dan prasarana seperti transportasi, juga informasi tentang apapun masih sangat minim (Wardah, 2022) Halim melanjutkan bahwa perempuan pedesaan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan, nutrisi, pengelolaan lahan, konservasi sumber daya alam, dan ketahanan iklim. Halim menambahkan bahwa perempuan sangat penting untuk mencapai 18 tujuan dan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs) (Wardah, 2022).

Melihat fenomena di atas, penulis melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana peran perempuan dalam pembangunan desa khususnya peran yang dilakukan melalui organisasi PKK yang terdapat di desa, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Pulau Semambu, Ogan Ilir. Berikut data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Pulau Semambu:

Tabel 1. Data Kependudukan Desa Pulau Semambu, Ogan Ilir tahun 2023

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Laki-laki	Perempuan
1	Dusun I	92 KK	295 Jiwa	142 Orang	153 Orang
2	Dusun II	75 KK	313 Jiwa	153 Orang	160 Orang
3	Dusun III	226 KK	755 Jiwa	362 Orang	393 Orang
4	Dusun IV	52 KK	260 Jiwa	127 Orang	133 Orang
5	Dusun V	68 KK	232 Jiwa	113 Orang	119 Orang
Jumlah		513 KK	1855 Jiwa	897 Orang	958 Orang

Sumber: Profil Desa Pulau Semambu

Data di atas menunjukkan secara kuantitas jumlah penduduk desa Pulau Semambu mayoritas di dominasi oleh perempuan, sehingga secara umum dapat kita katakan bahwa perempuan memiliki peranan yang cukup memberi dampak dalam program pembangunan di desa. Terlebih masyarakat yang berjenis kelamin yang masuk dalam usia produktif akan secara otomatis masuk dalam keanggotaan PKK sehingga peran perempuan di Desa tidak dapat dipandang sebelah mata.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pendahulu dengan pegiat PKK Desa Pulau Semambu bahwa dengan PKK Desa Pulau semambu merupakan salah satu PKK di Kabupaten OganIlir yang aktif dan berprestasi. PKK Desa Pulau Semambu sering menjadi sasaran pembinaan dari berbagai mitra di eksternal,

seperti Pertamina Patra Niaga, dan menjadi sasaran utama dalam kunjungan TPP PKK Provinsi. Selain itu tercatat pada Tahun 2022 PKK Desa Pulau Semambu merupakan Juara I Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten Ogan Ilir. Pada tahun yang sama PKK Desa Pulau Semambu juga merupakan Juara II lomba administrasi PKK Tingkat Kabupaten Ogan Ilir. Tak hanya itu, PKK Kabupaten Ogan Ilir juga merupakan satu-satunya PKK di Sumatera Selatan yang menggunakan aplikasi dalam input data dasawisma. Sehingga menarik diteliti tentang bagaimana peran agen dan fungsi struktur dalam organisasi PKK Desa Pulau semambu.

Untuk memperkuat argumentasi penelitian ini penulis menyertakan beberapa penelitian sejenis lainnya yang sudah ada juga telah memberikan kontribusi terhadap penelitian ini diantaranya oleh: Pertama, (Yadeta & Fojo, 2019) yang berjudul “Gender differences: Participation in agricultural production in Ethiopia”. Kedua, (Wiendijarti et al., 2020) yang berjudul “The Family Welfare Empowerment Movement (PKK) as a Structure Relationship and Agent in Community Empowerment”. Ketiga, (Adnyani & Purnamawati, 2020). Keempat, (Sudarsono, 2021) yang berjudul “Empowering The Head of Poor Women’s Family in Efforts to Improve Welfare (Case Study for Empowering The Head of Poor Women’s Family in Sidoarjo District)”. Kelima, (Kusumawiranti, 2021) yang berjudul “Pengarustamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa”. Keenam, (N et al., 2022) yang berjudul “Sosialisasi Pengarustamaan Gender Sebagai Upaya Membangun Desa Adil Gender di Desa Sapit Kecamatan Suela”. Ketujuh, (Ayissa Tazkia et al., 2022) yang berjudul Implementasi Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang”.

Secara umum, penelitian di atas menunjukkan masih adanya kesenjangan peran perempuan dalam pembangunan yang dilakukan diberbagai daerah khususnya di Indonesia. Partisipasi berbasis kolaborasi dengan masyarakat dalam sebuah penerapan pembangunan di desa belum optimal, padahal perangkat desa atau kepala desa sangat penting guna mengarahkan masyarakat untuk memiliki motivasi yang maju untuk berkolaborasi pada pembangunan di desanya yang dipimpin (Idham Noviar & Evi Priyanti, 2023)

Oleh sebab itu, faktor-faktor kesenjangan di atas akhirnya berkontribusi terjadinya pembentukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, sebuah wadah organisasi perempuan di masyarakat desa dan kecamatan. PKK adalah organisasi masyarakat desa yang memiliki kekuatan untuk menginspirasi partisipasi desa dalam pembangunan dan berkontribusi dalam prakarsa pembangunan desa. PKK merupakan gerakan yang muncul dari bawah ke atas, dengan perempuan berperan sebagai penggerak dalam menciptakan, membina, dan mengembangkan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai kelompok sosial terkecil. Di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan dusun telah melembagakan organisasi PKK (Manembu,

n.d). Selain menjadi organisasi yang mengakomodir gerakan dan kepentingan perempuan diberbagai level, PKK yang menjadi bagian kelembagaan desa memiliki fungsi yang terintegrasi dengan berbagai program pembangunan di level desa.

Berangkat dari latar belakang dan masalah yang dipaparkan di atas, penelitian ini akan menggunakan Teori Strukturasi. Menurut (Putranto et al., 2020) Teori strukturasi diperkenalkan oleh Anthony Giddens yang menjelaskan suatu sistem sosial itu dibangun dan dilancarkan dalam suatu keadaan melalui suatu hubungan timbal balik antara aktor dan struktur. Dari teori ini terdapat keseimbangan peran yang dilakukan oleh aktor dengan pikiran yang terbatas dalam sejarah tatanan sosial. Fokus terpenting dari teori strukturasi ini yaitu ikatan antara agensi dan struktur, yang mana hal tersebut menerangkan dualitas dan hubungan dialektis antara agensi dan struktur, karena agen dan struktur tidak bisa dimaknai secara terpisah karena keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Berikut penjabaran teori strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens. Menurut Giddens (Achmad, 2020) Tindakan seorang individu dapat didorong oleh keinginan mencari tahu tindakan itu sendiri atau sebuah proses pemeriksaan diri yang disebut sebagai pemantauan refleksif. Model tindakan Giddens dalam teori terdapat dua elemen yang merupakan pemantauan refleksif atau kesadaran dalam bertindak yaitu rasionalisasi dan motivasi. Struktur, yang merupakan aturan dan sumber daya. Giddens (2010) mengatakan bahwa "*Structure can be analysed as rules and resources*". Pada tulisan yang lain Giddens mengatakan bahwa struktur adalah aturan dan sumberdaya yang secara rekursif terhubung dalam pengelolaan sistem sosial. Penelitian ini akan mengaitkan penyelenggaraan PKK dalam pembangunan desa menggunakan perspektif strukturisasi. Tidak hanya struktur, tetapi agen juga memiliki peran yang sangat besar dalam peran organisasi PKK mendorong keterlibatan perempuan dalam sejumlah program pembangunan desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal tersebut adalah agen.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2017) memberikan definisi metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif yang disampaikan dengan kata-kata tertulis, gambar yang didapatkan dari fenomena yang diamati. (Pasolong, 2016) menjelaskan penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah proses mendeskripsikan dan menganalisis individu maupun kelompok berdasarkan fenomena, peristiwa, sikap, pemikiran, dan aktivitas sosial yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui tindakan wawancara, observasi dan dokumen lainnya yang membantu analisis kasus penelitian. Kemudian, data hasil wawancara dan dokumentasi divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman

(Sugiyono, 2016).Selanjutnya, untuk memperkuat hasil validasi tersebut, data hasil wawancara diolah menggunakan software NVivo 12 Plus untuk analisis data dan melihat jejaring informasi dari informan.

2. Pembahasan

Pembangunan merupakan konsep teoritik yang wujudnya terealisasi melalui target dan partisipasi kolektif dari semua unsur negara. Partisipasi dalam pembangunan, terutama di negara demokrasi menjadi bagian yang sangat krusial dan menjadi jantung pembangunan. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang melakukan berbagai strategi yang terstruktur dalam merealisasikan program-program pembangunan, utamanya membentuk organisasi-organisasi turunan untuk mendukung implementasi sejumlah program pemerintah. Salah satunya adalah organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terstruktur dari pusat, daerah, bahkan hingga ke wilayah pedesaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap peran organisasi PKK di Desa Pulau Semambu dalam program pembangunan didapatkan berbagai temuan jika dianalisis menggunakan perspektif strukturasi. Berikut paparan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan:

Peran Organisasi Pkk dalam Pembangunan Desa

Untuk melihat sejauh mana peran organisasi PKK dalam pelaksanaan dan program pembangunan di desa akan diurai menggunakan pendekatan teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. (Giddens, 2010) mengatakan dalam teorinya bahwa strukturasi memusatkan pada praktik sosial yang berulang yang menghubungkan antara agen dan struktur. Antara agen dan struktur tidak dapat dipisahkan, menurut Giddens antara agen dan struktur seperti dua mata uang logam. Keduanya memiliki hubungan dwi rangkap. Adapun analisis hasil penelitian akan menguraikan beberapa indikator yang berkaitan dengan analisis peran organisasi, yang terdiri dari Indikator Rasionalitas Tindakan serta Motivasi Tindakan dan Kesadaran Aktor penggerak organisasi PKK. Sementara itu dalam mengurai analisa strukturnya digunakan indikator Regulasi dan Sumber Daya yang mempengaruhi sistem dan proses organisasi secara struktural. Adapun pembahasan lebih lanjut sebagai berikut:

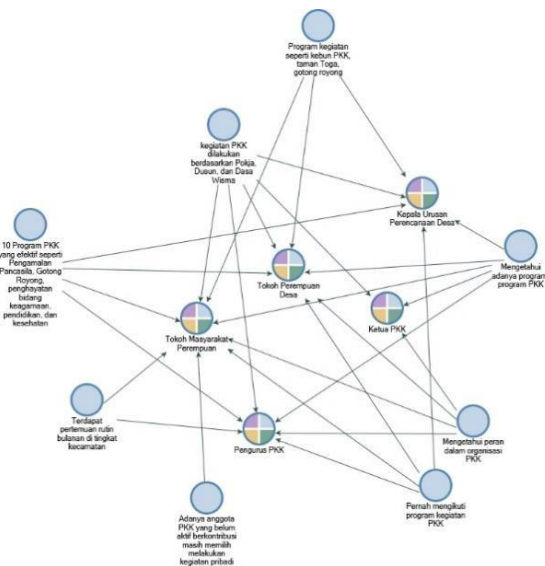
2.1. Rasionalitas tindakan Aktor PKK dalam Menjalankan Peran

Seperti yang diringkas Ritzer dalam(Lamsal, 2012) agen dalam bertindak akan terus memantau pikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks fisik dan sosial mereka. Pencarian akal oleh agen dalam pikiran dan aktivitasnya sendiri disebut rasionalisasi. Agen mencoba untuk merasionalisasi setiap rutinitas tindakan untuk dapat menciptakan kondisi yang diharapkan. Tujuan dari rasionalitas tindakan adalah munculnya partisipasi aktor PKK yang bertindak atas dasar pertimbangan rasional yang jelas. Partisipasi ini menjadi segala bentuk tindakan

masyarakat dalam kegiatan-kegiatan organisasi (Sejati et al., 2019).

Berdasarkan data hasil *indept interview* yang dilakukan dengan informan dan dilakukan olah data menggunakan software Nvivo, maka identifikasi tindakan rasional aktor ketika menjalankan perannya dalam organisasi PKK divisualisasikan sebagai berikut:

Gambar 1. Data Identifikasi Rasionalitas tindakan Aktor PKK dalam Menjalankan Peran



Sumber: Olah data menggunakan Software Nvivo 12 Plus

Berdasarkan hasil visualisasi data tersebut dapat dianalisa beberapa hal, yakni bahwa *key informan* memberikan sejumlah informasi terkait mekanisme kerja organisasi PKK dan berbagai program PKK. Ketua PKK menjelaskan bahwa mekanisme yang berlangsung dalam organisasi PKK dilaksanakan melalui pokja, dusun dan dasa wisma. Pengurus PKK yang merupakan salah seorang informan pada penelitian ini juga menjelaskan secara rinci bahwa dalam merealisasikan Kebun PKK dilakukan tata kelola tempat yang terdiri dari kebun khusus PKK dan Kebun Dasa Wisma. Sementara itu dalam konteks implementasinya dijelaskan bahwa kegiatan keagamaan seperti pengajian dan tausiyah, serta kegiatan kesehatan yang terdiri dari stunting dan lansia masuk ke Pokja (Pokok Kerja) 4, termasuk hal-hal yang merupakan kaderisasi dalam internal organisasi PKK. Dalam hal pendidikan yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dikelola oleh Pokja 2, penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh Pokja 1, dan perihal sandang dan pangan yang menjadi program dari Pokja 3.

Hal tersebut juga dikonfirmasi dengan penjelasan yang sama oleh beberapa Tokoh Masyarakat dari unsur perempuan dan Kepala Urusan Perencanaan Desa. Pengurus PKK lainnya juga menjelaskan bahwa sejumlah program yang dilaksanakan oleh PKK berdampak secara langsung terhadap pengetahuan dan ekonomi masyarakat. Misalnya sebelum ada program Tanaman Obat Keluarga (TOGA) sebagian besar masyarakat hanya memanfaatkan lahan berupa taman

untuk menanam sejumlah varian bumbu dapur, akan tetapi setelah ada program TOGA masyarakat jadi mengetahui sejumlah tanaman herbal dan khasiatnya bagi kesehatan masyarakat.

Berdasarkan beberapa data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar narasumber telah memahami program PKK yang terdiri dari Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Penghayatan bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan. dalam hal realisasinya, di Desa Pulau Semambu dilaksanakan sejumlah program seperti: Kebun PKK, Taman Toga, dan Gotong Royong, serta pertemuan rutin bulanan di tingkat dusun, desa, dan kecamatan. Terkait mekanisme jalannya organisasi, Kaur Pembangunan Desa Pulau Semambu juga menjelaskan bahwa organ terkecil dari organisasi PKK adalah Dasa Wisma. Dasa Wisma itu ada di setiap dusun. Di setiap dusun ada sekitar dua sampai dengan tiga Kelompok Dasa Wisma yang memiliki kegiatan rutin sendiri seperti rapat rutin dan arisan.

Berdasarkan hasil temuan di atas jika kita kaitkan dengan konsep teori yang dikemukakan Giddens (2010) Seperti yang dijelaskan oleh Giddens dalam (Johansyah et al., 2023) bahwa struktur sosial tidak hanya merupakan kumpulan norma, nilai, dan aturan yang ada di masyarakat, tetapi juga merupakan hasil dari tindakan individu atau agen yang terlibat dalam interaksi sosial. Melihat dari temuan dilapangan di atas terlihat bahwa Tindakan yang dilakukan para anggota dan pengurus PKK dilakukan tidak hanya berdasarkan intruksi saja melainkan dilakukan dengan adanya kesadaran dan inisiatif dari para aktor tersebut. Lebih jauh lagi guna menganalisa kedalaman pemahaman dan rasionalitas tindakan aktor organisasi PKK dalam sejumlah program PKK, penulis menanyakan beberapa hal yang meminta pendapat, penjelasan, dan rekomendasi dari masing-masing aktor organisasi PKK. Hal yang secara detail dijelaskan oleh tokoh masyarakat dari unsur perempuan yang menjelaskan bahwa evaluasi terbesar dari sejumlah program yang dilaksanakan adalah masih ada anggota PKK yang belum aktif dan berkontribusi. Evaluasi tersebut juga coba dijelaskan oleh Wakil sekretaris PKK Pulau Semambu, bahwa persoalan transportasi dari beberapa dusun ke tempat kegiatan juga menjadi hambatan atau faktor yang menyebabkan cukup banyak masyarakat yang akhirnya tidak aktif dalam organisasi PKK. Selain itu dampak terbatasnya anggaran organisasi PKK menyebabkan adanya biaya arisan PKK masyarakat, sehingga ada sebagian masyarakat lebih memilih untuk tidak mengikuti kegiatan PKK.

2.2. Motivasi Tindakan dan Kesadaran Aktor PKK dalam Bertindak

Motivasi tindakan atau kesadaran berkaitan dengan alasan dan faktor pendorong seseorang secara sadar melakukan suatu hal. Giddens menjelaskan agen memiliki motivasi untuk bertindak, atau dengan kata lain adanya keinginan yang mengarah pada atau mendorong tindakan. Giddens percaya bahwa sebagian besar tindakan kita tidak dimotivasi secara langsung, tetapi sebagian

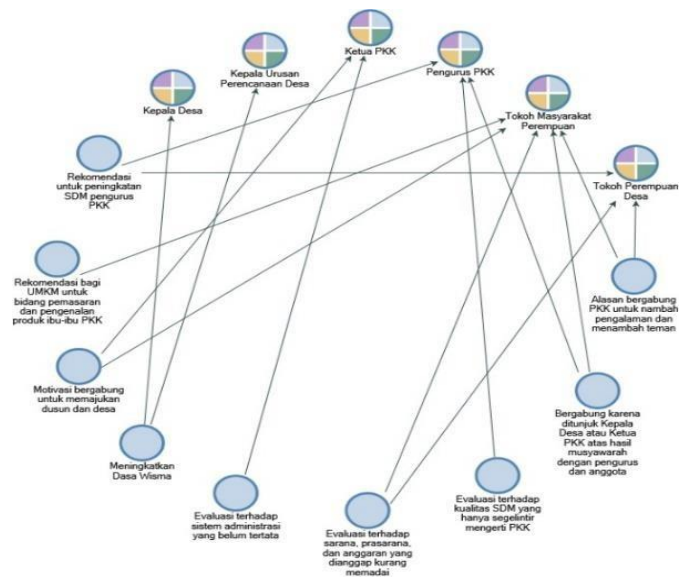
besar tidak disadari. Oleh karena itu, agen dapat merefleksikannya atas tindakan melalui berbagai faktor yang dapat memunculkan motivasi terhadap tindakan agen (Lamsal, 2012).

Apabila merujuk kepada sejumlah data dan informasi yang didapatkan dari narasumber, adapun beberapa alasan bergabung dengan organisasi PKK dikarenakan oleh alasan-alasan sosial tertentu, seperti misalnya untuk menambah teman dan ingin ikut berkontribusi untuk memajukan dusun dan desa atau mengabdikan kepada masyarakat, serta ditunjuk untuk mewakili dusun berdasarkan hasil musyawarah. Selain ini beberapa orang narasumber yang merupakan pengurus PKK menjelaskan bahwa sebagian besar pengurus PKK memang merupakan orang-orang yang sudah lama mengurus PKK, Misalnya saja Wakil Sekretaris PKK yang memang sudah bergabung sejak tahun 2008.

Apabila digali lebih dalam lagi, ada motivasi lain yang juga menurut analisa penulis memberikan pengaruh cukup kuat dalam memberikan motivasi aktifnya seorang pengurus PKK, yakni dukungan dari suami pengurus PKK yang juga merupakan unsur pemerintahan desa. Seperti Wakil Sekretaris dan Pengurus PKK yang menjadi narasumber yang merupakan istri dari anggota BPD Desa Pulau Semambu. Mengingat pengurus PKK memang tidak digaji dan berpartisipasi secara sukarela, bahkan mengeluarkan uang pribadi untuk bahu-membahu dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti yang dijelaskan anggota pengurus PKK, dalam pelaksanaan programnya, PKK mewajibkan anggotanya untuk berkontribusi melalui uang jimpitn atau iuran sebagai salah satu sumber anggaran operasional kegiatan. Bila dianalisa dalam konteks motivasi, maka hal ini menjadi suatu hal yang sangat menarik, karena kebiasaan ini bertolak belakang dengan kebiasaan umum yang berlaku dalam tata kelola pemerintahan negara yang kegiatannya selalu disusun berdasarkan penganggaran dari kas negara. Tidak hanya itu, motivasi tindakan aktor PKK di Desa Pulau Semambu tersebut data dikategorikan sebagai bentuk partisipasi aktif, karena tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan yang telah disiapkan organisasi saja, akan tetapi bahkan sudah menjadi penyandang dana yang menjaga keberlanjutan organisasi.

Disisi lain apabila kita menggunakan analisa dari perspektif kebudayaan, maka kita dapat melihat bahwa motivasi keiutsertaan anggota PKK dilevel desa juga dipengaruhi nuansa gotong royong yang selama ini menjadi identitas kebudayaan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di pedesaan. Berbagai kegiatan dilaksanakan secara mandiri dengan mengandalkan kekompakan dan sukarela warga desa. Kekompakan, silaturahmi dan kebersamaan menjadi bagian dari motivasi yang tentu berdampak terhadap organisasi secara berkelanjutan.

Gambar 2. Data Identifikasi Motivasi Tindakan dan Kesadaran Aktor PKK dalam Bertindak



Sumber: Olah data hasil wawancara lapangan (2023) menggunakan Software Nvivo 12 Plus

Berdasarkan Visualisasi hasil olah data diatas, dapat dianalisa bahwa motivasi partisipasi anggota organisasi PKK menunjukkan kepedulian yang baik terhadap organisasinya. Karena ternyata para pengurus menyadari sejumlah pekerjaan rumah yang harus mereka evaluasi dan dipikirkan solusi dan rekomendasinya. Kesadaran para pengurus terkait hal-hal yang masih menjadi titik lemah organisasi menjadi modal penting untuk merumuskan berbagai program sebagai bentuk perbaikan organisasi. Evaluasi terhadap sarana, prasarana, serta anggaran menjadi evaluasi penting yang disampaikan oleh tokoh masyarakat unsur perempuan yang juga sekaligus merupakan anggota PKK Desa Pulau Semambu. Menurut tokoh-tokoh tersebut peningkatan kualitas SDM PKK sangat penting dilakukan sehingga dapat berdampak positif terhadap tata kelola organisasi PKK.

Selain itu untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat terutama anggota PKK, perlu diperbanyak program-program yang memacu industri rumahan untuk berkembang menjadi UMKM, seperti pelatihan pemasaran dan pengenalan produk ibu-ibu PKK. Sejalan dengan itu Kepala Desa dan Kepala Urusan Perencanaan Desa juga membenarkan bahwa rekomendasi besar yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dan organisasi PKK adalah Peningkatan Dasawisma dalam hal pengembangan usaha. Menurut Kepala Desa Pulau Semambu pengembangan usaha dilevel Dasa Wisma ini harus disuport baik secara materil dan non materil, terutama dalam hal ketersediaan dana. Sehingga dapat menjawab persoalan yang menurut Kaur Pembangunan Desa Pulau Semambu menjadi penyebab beberapa dasa wisma kurang aktif dalam menjalankan fungsinya.

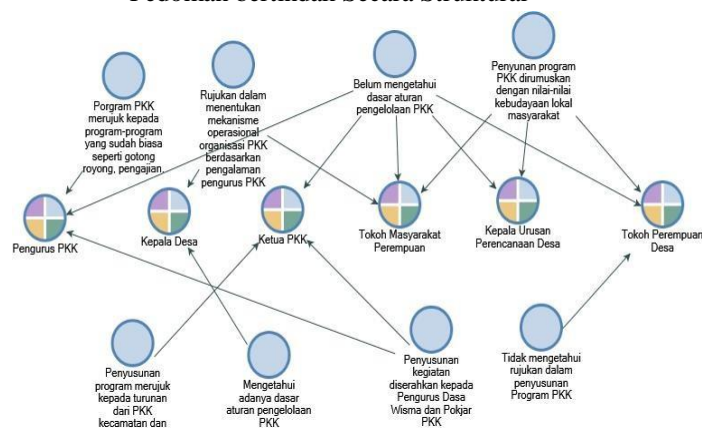
Jika mengacu kepada konsep teori strukturasi yang dikemukakan Giddens, motivasi mengacu pada potensi tindakan bukan pada model pelaksanaan tindakan. Motif agen dalam bertindak cenderung berdasarkan kepada tindakan yang dilakukan hanya dalam keadaan yang relatif tidak biasa, situasi yang tidak menjadi rutinitas. Motivasi Sebagian besar masuk kepada kondisi yang sudah terencana (Demartoto, 2013).

Mahfud dalam (Mazid & Suharno, 2019) mengemukakan bahwa secara riil, bangsa Indonesia memiliki keragaman bahasa, sosial, budaya, agama, aspirasi politik, serta kemampuan ekonomi. Nilai-nilai tersebut selayaknya tertanam dalam setiap kegiatan dan program di PKK, salah satunya kegiatan gotong royong. Meskipun nilai-nilai gotong royong sangat kuat dan melekat dalam budaya masyarakat di pedesaan, motivasi dan kesadaran masyarakat untuk aktif dalam organisasi PKK tidak dapat dipisahkan dari hal-hal yang pragmatis dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Terutamanya masyarakat pedesaan yang secara ekonomi sebagian besarnya berprofesi sebagai petani. Idealnya, program-program yang dirumuskan pemerintah dan diturunkan melalui organisasi-organisasi berbasis kemasyarakatan dapat menjadi jalan keluar dari persoalan ekonomi dan merigankan beban masyarakat, bukan justru sebaliknya. Apabila dikaitkan dengan konsepsi pembangunan, maka hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemertriaah harus searah. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang mestinya juga memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat itu sendiri.

2.3. Aturan dan Mekanisme bertindak Secara Struktural

Giddens memaknai struktur dengan istilah properti penataan atau seperangkat aturan dan sumber daya. Menurutny aturan dan sumber daya digunakan dalam proses tindakan sosial dan merupakan alat dalam pengelolaan sistem yang ada. (Giddens et al., 2009) Dalam teori morphogenetik, perhatian atas bidang struktur dipusatkan pada masalah bagaimana kondisi struktural memengaruhi interaksi sosial dan bagaimana interaksi ini selanjutnya menimbulkan perluasan struktural (Sudana, 2014). Indikator ini digunakan untuk menggali pemahaman pengurus PKK terkait aturan-aturan yang menjadi dasar dari pembentukan dan penyelenggaraan organisasi PKK. Adapun analisis data yang diperoleh dari narasumber terkait data tersebut divisualisasikan sebagai berikut:

Gambar 3. Data Identifikasi Regulasi yang Dijadikan Pedoman bertindak Secara Struktural



Sumber: Olah data menggunakan Software Nvivo 12 Plus

Berdasarkan dari visualisasi data di atas dapat dianalisa bahwa ketua, pengurus, dan anggota PKK belum mengetahui secara rinci aturan dasar pengelolaan organisasi PKK. Menurut Wakil Sekretaris PKK, penyusunan Program PKK merujuk kepada program-program yang telah biasa dilaksanakan dari tahun ke tahun, seperti Gotong Royong, pengajian, dan lain sebagainya. Sementara untuk penyusunan kegiatan-kegiatan PKK secara teknis sepenuhnya diserahkan kepada pengurus Desa Wisma dan Pokjar PKK. Argumen yang kurang lebih sama disampaikan oleh ketua PKK, bahwa penyusunan Program PKK merujuk kepada program turunan dari PKK kecamatan dan kabupaten. Sementara itu Kepala Desa Pulau Semambu menjelaskan bahwa selama ini, rujukan dalam menentukan mekanisme operasional organisasi PKK masih berdasarkan kepada pengalaman pengurus PKK. Padahal berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa telah dilakukan orientasi atau pembekalan bagi pengurus PKK.

Pada praktiknya, pelaksanaan pengelolaan organisasi PKK dijalankan melalui arahan pengurus TP PKK Pusat melalui petunjuk teknis yang menjadi acuan dalam mengelola organisasi PKK. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Melalui maka Rakernas IX PKK Tahun 2021 telah dihasilkan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024 yang termuat dalam Juknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK tahun 2021 yang diterbitkan TP PKK Pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, (2021). Merujuk pada peraturan dan juknis di atas, dalam pengelolaan organisasi PKK diatur mengenai bidang Kelompok Kerja (POKJA) sebagai pengelola kegiatan PKK:

Tabel 2. Bidang Pokok Kerja PKK Desa Pulau Semambu

No	Bidang Pokja
1	Pokja I sebagai pengelola program: <ul style="list-style-type: none"> - Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. - Gotong Royong.
2	Pokja II sebagai pengelola program: <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Keterampilan. - Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
3	Pokja III sebagai pengelola program: <ul style="list-style-type: none"> - Pangan. - Sandang. - Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
4	Pokja IV sebagai pengelola program: <ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan. - Kelestarian Lingkungan Hidup. - Perencanaan Sehat.

Sumber: Diolah Penulis

Meskipun demikian, berdasarkan penjelasan dari beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi mekanisme yang berlangsung dalam organisasi sudah cukup sistematis dan terstruktur. Ketua PKK Desa Pulau Semambu menjelaskan bahwa Proses jalannya organisasi PKK diawali dengan penyusunan struktur dan SK dari Kecamatan. Pihak PKK diminta mengisi format yang sudah ada. Di Desa Pulau Semambu, penyusunan struktur memperhatikan keterwakilan enam dusun secara merata sehingga terwujudnya proses yang adil dan representatif. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Desa yang menegaskan bahwa apabila kecenderungannya dimana-dimana pengurus PKK itu berasal dari dusun tempat tinggal kades, akan tetapi dalam periode kepemimpinannya dia menginginkan adanya pemerataan keterwakilan semua dusun guna mendukung penyelenggaraan PKK yang aktif disemua dusun. Pada proses penyusunan struktur organisasi yang dilakukan tersebut dari hasil analisis peneliti tidak melanggar dari juknis yang telah ditetapkan.

Seperti misalnya pelatihan kerajinan turun-temurun, dan lain sebagainya. Perhatian terhadap nilai kearifan lokal ini menjadi penting mengingat saat ini kebudayaan lokal menghadapi tantangan dalam mempertahankan eksistensinya dari pengaruh budaya global. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke dalam negeri baik melalui internet, media televisi dan media cetak, akan semakin mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. (Ulum & Suharno, 2019). Temuan data yang diperoleh dari Ketua PKK yang menjelaskan bahwa terdapat POKJA yang menjadi perpanjangan tangan PKK, juga Dasa Wisma. Dasa Wisma terdiri dari sepuluh sampai dengan dua puluh rumah yang berdekatan. Dasa Wisma ada kegiatan rutin bulanan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga secara koordinasi berjalan dari level Dasa Wisma, PKK Desa,

PKK Kecamatan dan PKK Kabupaten. Sementara itu Wakil Sekretaris PKK juga menjelaskan bahwa dalam hal perumusan program kegiatan baik di level Dasa Wisma maupun Desa tetap disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Berkaitan dengan mekanisme dalam organisasi PKK, penulis juga melakukan analisis data dengan metode *word frequency* untuk melihat kecenderungan yang secara internal organisasi memiliki dominasi peran yang berdampak secara intens terhadap keseluruhan aktivitas dan kegiatan organisasi PKK. Adapun analisis datanya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Data Identifikasi Sumber Daya dalam Mendukung Berjalannya Struktur



Sumber: Olah data menggunakan Software Nvivo 12 Plus

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa dasa wisma memiliki peran yang dominan dan strategis dalam berjalannya organisasi PKK. Keberadaannya dilevel akar rumput menentukan produktivitas organisasi karena bersentuhan langsung dengan sumber daya manusia organisasi, dan menjadi unit yang menjawab secara langsung kebutuhan pengurus PKK di level dusun. Sehingga dibandingkan dengan unit struktural lainnya seperti Pokja, dasa wisma terlihat lebih krusial secara posisi dan fungsinya. Hal ini dapat dimaknai dalam konteks yang positif dan negatif. Secara positifnya, dasa wisma yang aktif posisi dan fungsinya menjadi bagian yang paling penting sebagai mesin penggerak organisasi PKK, sehingga keberadaannya terus dibicarakan. Sementara bila bergeser dalam perspektif negatifnya, dasa wisma yang tidak aktif menjadi sumber berbagai persoalan dan evaluasi yang berdampak tidak maksimalnya peran organisasi PKK secara akumulatif.

Selain itu jika dilihat secara keseluruhan program pokok PKK yang diselenggarakan belum berjalan secara efektif, karena hanya beberapa program saja yang berjalan efektif. Jika mengacu pada Juknis Tata

Kelola Kelembagaan Gerakan PKK tahun 2021. Bahwa tugas dan fungsi pokjar harus seimbang yaitu melakukan penyusunan rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya dan melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Proses monitoring dan evaluasi yang seharusnya dilakukan juga belum berjalan baik, idealnya terdapat pelaksanaan evaluasi terhadap 10 Program pokok PKK dilakukan melalui instrumen, yaitu:

- Input, indikatornya seperti dukungan kebijakan (misalnya dukungan anggaran, dukungan penerbitan surat keputusan, dan sebagainya), pelaksanaan kegiatan, jumlah sumber daya, SDM dan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- Proses, indikatornya Visi, Misi, tujuan, dan sasaran.
- Output, indikatornya kinerja seperti peningkatan yang positif dalam jangka menengah dan jangka panjang.
- Outcome, indikatornya tingkat keberhasilan dari kegiatan yang positif, manfaat, dan dampak kegiatan 10 Program Pokok PKK.

Namun, proses tersebut belum terealisasi secara efektif dalam menilai pelaksanaan terhadap 10 program pokok PKK.

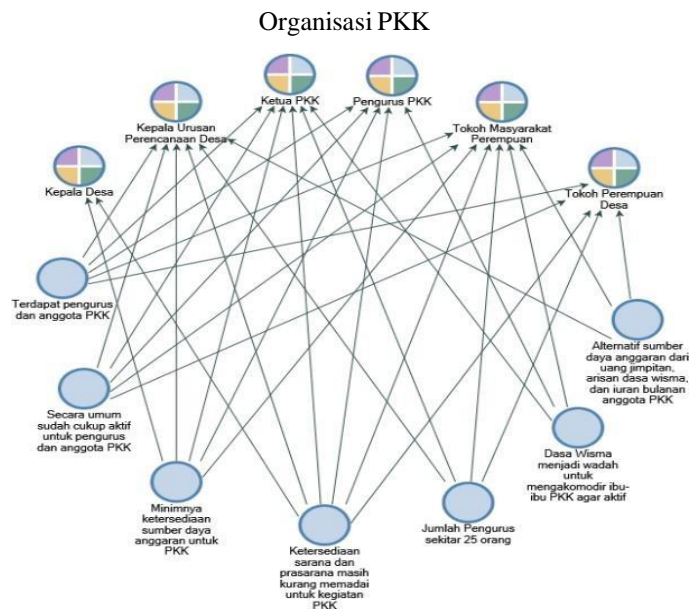
2.4. Sumber Daya dalam Mendukung Berjalannya Struktur Organisasi PKK

Meter, V. dan Van Horn mengatakan sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan baik secara finansial, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana untuk melaksanakan program. Sumber daya merupakan komponen utama sebuah organisasi dan berdampak vital terhadap keberlanjutan organisasi tersebut (Indiahono, 2017). Masalah utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana manajemen sumber daya manusia (SDM) berperan dalam mempengaruhi arah dan strategi perkembangan organisasi. Selain itu, jika sumber daya manusia dianggap sebagai bagian integral dari proses pilihan strategik. Sumber daya manusia menjadi salah satu sumber daya yang memegang posisi sangat strategis karena akan menentukan skenario berjalannya sebuah organisasi, dan lebih jauh lagi kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghadirkan inovasi untuk mengembangkan organisasi (Tampubolon, 2016). Sarana dan prasarana merupakan logistik yang digunakan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang maksimal, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana secara umum sangat berdampak terhadap maksimal dan tidak maksimalnya kinerja sebuah organisasi (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2014).

Kesetaraan gender sebagai faktor budaya dan sosial ekonomi yang menghasilkan sumber daya yang setara serta akses yang sama ke sumber daya dan peluang bagi perempuan dan laki-laki. Dalam konteks ini, dilihat dari keterlibatan dalam institusi formal dan informal dan faktor sosial ekonomi bagi agen organisasi (Garcia et al., 2023). Pada pembahasan ini peneliti akan menggali bagaimana ketersediaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di organisasi PKK Desa Pulau Semambu dan ketersediaan sarana prasarana pendukungnya dalam memaksimalkan fungsi dan kinerja

organisasi PKK. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang narasumber dilakukan analisis data dan divisualisasikan sebagai berikut:

Gambar 5. Data Identifikasi Sumber Daya dalam Mendukung Berjalannya Struktur



Sumber: Olah data menggunakan Software Nvivo 12 Plus

Berdasarkan visualisasi data tersebut, terlihat bahwa narasumber yang merupakan Ketua PKK, Wakil Sekretaris PKK yang juga merupakan Tokoh Perempuan Desa, Pengurus PKK dan Kepala Urusan Perencanaan Desa menjelaskan bahwa secara umum pengurus dan anggota PKK sudah cukup aktif. Lebih Jelasnya Kepala Urusan Perencanaan Desa menjelaskan bahwa pengurus PKK terdiri dari 25 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan Pokja 1, 2, 3, dan 4. Pengurus PKK hanya orang-orang tertentu saja yang merupakan perwakilan perdesun. Lebih detailnya Ketua PKK menjelaskan bahwa pengurus PKK itu ada 7 orang terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris 2 orang, dan bendahara 2 orang, terus masing-masing Pokja itu 5 orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, anggota 1,2, dan 3. Jadi 4 Pokja ada 20 orang.

Menurut Kepala Urusan Perencanaan Desa perihal keaktifan anggota, dasa wisma di dusun tiga dan 6 terlihat sebagai dasa wisma yang paling kompak dan aktif dalam kegiatan organisasi PKK. Misalnya ketika ada hajatan secara kompak mereka punya panggung sendiri, dan para ibu-ibu PKK memasak bersama di panggung tersebut. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Tokoh Masyarakat yang juga merupakan anggota PKK, beliau menjelaskan bahwa dusun 3 dan dusun 6 merupakan dasa wisma nya yang paling aktif, sementara untuk dasa wisma di dusun lain kadang aktif dan kadang tidak. Beliau menambahkan misalnya dasa wisma di dusun 5 aktif setiap bulan puasa, dan mereka melakukan kegiatan bagi-bagi takjil. Berdasarkan penilaian beliau selama ini

aktifnya anggota PKK itu full ketika mau ada lomba. Selanjutnya Wakil Sekretaris PKK juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan organisasi PKK kita tidak dapat memaksakan anggota untuk aktif, apabila itu sudah menyangkut biaya dan hal-hal materil lainnya. Itulah kenapa apabila ingin melihat keaktifan anggota, relatif yang aktif wajahnya itu-itu saja.

Berdasarkan penjelasan dari wakil sekretaris PKK, terkait rekrutmen anggota, PKK Desa Pulau Semambu menyiapkan mekanisme melalui masing-masing dasa wisma. Calon anggota PKK mengisi form keanggotaan melalui dasa wisma di dusunnya masing-masing untuk selanjutnya dilibatkan dan mengikuti kegiatan-kegiatan PKK. Sementara itu perihal pengembangan sumber daya manusia tidak ada yang dilakukan secara khusus, relatif dilakukan secara tidak langsung melalui kegiatan dan persiapan-persiapan perlombaan. Akan tetapi bila dilihat dari prestasi, PKK Desa Pulau Semambu sering mendapatkan berbagai penghargaan dan juara lomba. Hal ini menunjukkan kualitas SDM terus berkembang. Bahkan saat ini PKK Desa Pulau Semambu tidak dibolehkan lagi mengikuti beberapa perlombaan karena sudah sering memenangkan perlombaan tersebut, tujuannya agar memberikan kesempatan bagi PKK Desa-desa lain untuk mendapatkan juara perlombaan. Berdasarkan penjelasan Ketua PKK, bahkan saat ini PKK Desa Pulau Semambu justru dilibatkan untuk mendampingi beberapa PKK desa lain agar juga berprestasi.

Selain sumber daya manusia, sarana prasarana juga menjadi bagian sumber daya yang tidak bisa diabaikan, karena sarana prasarana menjadi amunisi penting dalam implementasi kegiatan-kegiatan PKK. Perihal sarana dan prasarana di Desa Pulau Semambu dapat dikatakan sangat minim. Seperti yang dijelaskan oleh ketua PKK Desa Pulau Semambu bahwa untuk perlombaan saja PKK masih pinjam uang pemerintahan desa, terkait kantor seharusnya bahkan PKK itu memiliki kantor sendiri, hanya kita tidak punya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Desa Pulau Semambu yang menyatakan bahwa tidak ada anggaran untuk pembangunan kantor, terkait anggaran juga sempat dialihkan untuk bantuan covid, sehingga sebagian besar anggaran keuangan desa difokuskan kesana. Wakil sekretaris PKK juga menjelaskan bahwa sejauh ini sarana dan prasarana masih menggunakan peralatan yang ada di kantor desa, seperti *mic* dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Sementara dalam hal operasional organisasi lebih banyak bersumber dari uang jimpitan atau iuran yang bersumber dari anggota PKK dan dukungan dana secara pribadi dari kepala desa. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris PKK Desa Pulau Semambu bahwa untuk kegiatan rutin mingguan menggunakan uang jimpitan berupa kas.

Sementara itu Ketua PKK menjelaskan bahwa usulan kebutuhan anggaran PKK selalu diusulkan ketika musrenbangdes, hanya saja tidak disetujui secara keseluruhan, karena jumlah anggaran yang juga tidak terlalu besar dan dibagi proporsinya dengan kebutuhan

desa lainnya. Se jauh ini anggaran PKK Desa Pulau Semambu selama satu tahun adalah Rp. 5.000.000,- Sementara kebutuhan anggarannya kurang lebih Rp. 50.000.000,- Sehingga solusinya sejauh ini adalah mengambil sumber lain seperti anggaran ketahanan pangan sebagai dana daruratnya. Itu pun menggunakan sistem *reimburse*, yang artinya ditalangi terlebih dahulu dan diganti setelah kegiatan berjalan.

3. Kesimpulan

Secara umum keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan PKK telah diorganisir dengan baik melalui dasawisma di masing-masing dusun, hanya saja dasawisma di beberapa dusun perlu mendapatkan dorongan motivasi untuk lebih aktif, salah satunya dengan membangun hubungan silaturahmi yang kuat agar tercipta kekompakan antar unsur masyarakat. Hal ini menjadi catatan penting karena motivasi keikutsertaan masyarakat dalam organisasi PKK berlangsung secara sukarela dan didasari alasan-alasan sosial tertentu. Secara struktural meskipun sebagian besar unsur dalam organisasi PKK tidak mengetahui secara detail terkait regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan organisasi PKK, akan tetapi unsur pengurus yang mengelola organisasi tersebut sudah memahami tujuan dari organisasi PKK tersebut. Secara sumberdaya, PKK di Desa Pulau Semambu memiliki keterbatasan sumber daya secara material, sehingga sebagian besar anggaran program menggunakan sumbangan sukarela oleh para anggota dan donasi pribadi dari unsur pemerintahan desa. Sementara itu, dalam hal tata kelola SDM Organisasi PKK di Desa Pulau Semambu dapat disimpulkan sudah baik, hal itu terlihat dengan bagaimana pemerataan unsur pengurus dari setiap dusun dan rekrutmen yang terstruktur pada dasawisma disetiap dusun. Hal ini secara praktik terlihat dari sejumlah prestasi yang telah diraih ditengah keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi. Kesimpulan umum dalam perspektif strukturasi, peran organisasi PKK dalam mendukung program pembangunan desa belum terlalu maksimal, keterlibatan organisasi PKK dalam program-program pembangunan desa terjadi secara tidak langsung melalui program-program internal PKK, dan partisipasi perempuan pada program-program desa lebih kepada faktor personal karena isu gender yang cukup kuat secara sosial. Keterlibatan secara langsung organisasi PKK dalam program pembangunan desa hanya dilakukan pada beberapa program yang memang secara anggaran terikat dengan pemerintahan desa.

Acknowledgment

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun non-material sehingga penelitian ini dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa Pulau Semambu dan terkhusus kepada Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Pulau Semambu atas kesediaannya

sebagai mitra dan membantu peneliti dalam dan proses pengumpulan data. Harapannya penelitian ini dapat berdampak positif terhadap optimalisasi peran PKK Desa Pulau Semambu dalam mendukung program-program pembangunan di Desa Pulau Semambu.

Daftar Pustaka

- Achmad, Z. A. (2020). Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 9(2), 45–62. <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.989>.
- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 26–43. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>
- Ayissa Tazkia, A. T., Listyaningsih, & Juliannes Cadith. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25–44. <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93>
- Demartoto, A. (2013). Teori Strukturasi dari Anthony Giddens. In *Wordpress*.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. (2021). *Juknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK*. Kementerian Dalam Negeri.
- Garcia, M. F., Ahmed, R., Flores, G. L., & Halliday, C. S. (2023). Gender equality and comparative HRM: A 40-year review. *Human Resource Management Review*. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2023.100972>
- Giddens, A. (2010). *Teori strukturasi : dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Giddens, A., Taylor, S., Howes, S., Halovine (Firm), & Interviewer: Steve, T. (2009). Anthony Giddens on Capitalism & modern social theory. In *The classic collection*.
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 1, 156–172.
- Idham Noviar, & Evi Priyanti. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 8(3), 213–220.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis* (1st ed.). Penerbit Gava Media.
- Johansyah, O. N. R., Yakub, A., & Kambo, G. A. (2023). Praktik Sosial-Politik Birokrasi Pemerintahan dalam Pemilukada di Indonesia: Perspektif Teori Strukturasi. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 19–36. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3659>
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. In *Remo Kusumawiranti / POPULIKA* (Vol. 9, Issue 1).
- Lamsal, M. (2012). The Structuration Approach of Anthony Giddens. *Himalayan Journal of Sociology and Anthropology*, 5. <https://doi.org/10.3126/hjsa.v5i0.7043>
- Mazid, S., & Suharno, S. (2019). Implementasi nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran PKn. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(1), 72–85. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i1.10248>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- M.P.R. (n.d.). *Kongres ke-25 Persatuan Wanita Republik Indonesia, Ketua MPR RI Bamsuet Dorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen*.
- N, K., Siti Nurjannah, & Solikaturun. (2022). SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN DESA ADIL GENDER DI DESA SAPIT KECAMATAN SUELA. *Prosiding PEPADU*, 4, 66–70.
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. (2014). *Manajemen Sumber Daya Organisasi* (Hendro Novianto Sujarwo, Ed.; 1st ed.). Pusdiklatwas BPKP.
- Putranto, A., Arsa Widitarsa Utoyo, & Santi Delliana. (2020). ANOMALI TEORI STRUKTURASI PADA MEDIA ONLINE (KASUS KEPATUHAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA). *Jurnal Studi Agama*, 8(1). <https://tirto.id/mayor-jenderal-magenda-dan-penculik-para-jenderal-cso3>
- Sejati, A. E., Hasan, M., & Hidayati, D. N. (2019). The level participation in efforts mount Kelud eruption disaster mitigation in East Java. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i1.27847>
- Sudana, I. P. (2014). Teori Strukturasi Dan Akuntansi Sustainabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2).
- Sudarsono, H. (2021). Empowering The Head of Poor Women's Family in Efforts to Improve Welfare (Case Study for Empowering The Head of Poor Women's Family in Sidoarjo District). *Enrichment: Journal of Management*, 11(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Tampubolon, H. (2016). *STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN KEUNGGULAN BERSAING* (1st ed.). Papas Sinar Sinanti.
- Ulum, A. Z., & Suharno, S. (2019). Dampak Infiltrasi Budaya Global dalam Pesta Baratan Masyarakat Jepara. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2).

- Wardah, F. (2022). *Peran Perempuan Penting dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: VoA. <https://www.voaindonesia.com/a/peran-perempuan-penting-dalam-pembangunan-desa-/6791834.html>
- Widodo, A., Kurniawan, R. C., & Maryanah, T. (2023). Problematika Keterwakilan Perempuan dalam pengisian keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2771>
- Wiendijarti, I., Wahyuni, I., & Witjaksono, R. (2020). The Family Welfare Empowerment Movement (PKK) as a Structure Relationship and Agent in Community Empowerment. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *Www.Ijicc.Net*, 13(1), 392–405. www.ijicc.net
- Yadeta, G., & Fojo, G. A. (2019). Gender differences: Participation in agricultural production in Ethiopia. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2), 183–194. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.26724>